



WALIKOTA MADIUN

**PERATURAN WALIKOTA KOTA MADIUN
NOMOR 35 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

RS
SE



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan dan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan ;
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E) ;
35. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/B);
36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/B) ;
37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/C);
38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/E);
39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 3/B) ;
40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/B) ;
41. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 10/E);
42. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 2/E);

43. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 3/A) ;
44. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 2/A) ;
45. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
46. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
47. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 14/D);
48. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 3/A);
49. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 2/A);
50. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 1/A) ;
51. Peraturan Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

52. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 252.048.754.413,59
2. Dana Perimbangan	Rp. 681.537.181.650,00
3. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. <u>160.781.561.933,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.1.094.367.497.996,59

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp.375.303.304.387,00
b) Belanja Bunga	Rp. 0,00
c) Belanja Subsidi	Rp. 0,00
d) Belanja Hibah	Rp. 15.422.819.810,08
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp 15.001.277.870,00
f) Belanja Bagi Hasil kepada Kelurahan	Rp. 0,00
g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 651.920.000,00
h) Belanja Tidak Terduga	Rp. <u>118.877.262,00</u>
	Rp.406.498.220.133,46

2. Belanja Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp. 64.919.057.388,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.369.278.712.052,86
c) Belanja Modal	Rp.307.800.742.344,06
Jumlah Belanja	<u>Rp.1.148.496.711.114,00</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp. 54.129.213.117,41)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp.279.278.826.431,22
2. Pengeluaran	Rp 1.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp.277.778.826.431,22</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun berkenaan	Rp.223.649.613.313,81

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **Madiun**
pada tanggal 28 Juli 2020

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di **Madiun**
pada tanggal 28 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2020 NOMOR 35/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **WALIKOTA MADIUN**
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIGWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

DAFTAR - ISI

	Halaman
Lampiran I Rekapitulasi Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja.....	1
01.01. Pendidikan	
01.01.01. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.....	21
01.02. Kesehatan	
01.02.01. Dinas Kesehatan.....	231
01.02.02. Rumah Sakit Umum Daerah.....	273
01.03. Pekerjaan Umum	
01.03.01. Dinas Pekerjaan Umum	277
01.04. Perumahan dan Kawasan dan Permukiman	
01.04.01. Dinas Perumahan dan Kawasan dan Permukiman.....	298
01.05. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
01.05.01. Satuan Polisi Pamong Praja.....	320
01.05.02. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	336
01.06. Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
01.06.01. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	342
01.07. Tenaga Kerja	
01.07.01. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi.....	365
01.08. Lingkungan Hidup	
01.08.01. Dinas Lingkungan Hidup.....	387

	Halaman
01.09. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
01.09.01. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	403
01.10. Perhubungan	
01.10.01. Dinas Perhubungan.....	411
01.11. Komunikasi Informatika, statistik dan Persediaan	
01.11.01. Dinas Komunikasi dan Informatika.....	427
01.12. Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
01.12.01. Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro.....	444
01.13. Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga	
01.13.01. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga.....	459
01.14. Perpustakaan dan Kearsipan	
01.14.01. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	475
01.15. Kepala Daerah dan DPRD	
01.15.01. Walikota dan Wakil Walikota.....	483
01.16. Unsur Staf	
01.16.01.01 Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pemerintahan Umum.....	484
01.16.01.02 Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi.....	495
01.16.01.03 Sekretariat Daerah - Bagian Umum.....	504
01.16.01.04 Sekretariat Daerah - Bagian Hukum.....	513
01.16.01.05 Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial.....	519
01.16.01.06 Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan.....	530

		Halaman
01.17.	Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	
01.17.01	Sekretariat DPRD.....	536
01.18	Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
01.18.01	Badan Kepegawaian Daerah.....	549
01.19.	Penunjang Keuangan	
01.19.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	563
01.19.02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD).....	573
01.19.03	Badan Pendapatan Daerah.....	583
01.20.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
01.20.01	Inspektorat Daerah.....	592
01.21.	Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
01.21.01	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.....	600
01.22.	Kecamatan	
01.22.01.	Kecamatan Kartoharjo.....	611
01.22.02.	Kecamatan Manguharjo.....	635
01.22.03.	Kecamatan Taman.....	658
01.23.	Kesatuan Bangsa	
01.23.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	681
02.01.	Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	
02.01.01.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	700
02.02.	Perdagangan	
02.02.01.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata.....	729

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 35 TAHUN 2020
 TANGGAL : 28 juli 2020

PEMERINTAH KOTA MADIUN
 RINGKASAN PENJABARAN REALISASI APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN	1.100.017.042.506,00	1.094.367.497.996,59	(8.722.963.875,12)	99,49%
4 1	Pendapatan Asli Daerah	226.448.081.506,00	252.048.754.413,59	22.527.253.541,88	111,31%
4 1 1	Hasil Pajak Daerah	82.332.000.000,00	91.077.191.655,45	8.745.191.655,45	110,62%
4 1 1 01	Pajak Hotel	6.505.000.000,00	6.626.179.761,00	121.179.761,00	101,86%
4 1 1 01 01	Hotel Bintang	5.290.000.000,00	5.400.511.852,00	110.511.852,00	102,09%
4 1 1 01 02	Hotel Melati	905.000.000,00	906.785.409,00	1.785.409,00	100,20%
4 1 1 01 03	Rumah Kos	310.000.000,00	318.882.500,00	8.882.500,00	102,87%
4 1 1 02	Pajak Restoran	10.750.000.000,00	12.986.705.054,18	2.236.705.054,18	120,81%
4 1 1 02 01	Restoran/Rumah Makan	10.750.000.000,00	12.986.705.054,18	2.236.705.054,18	120,81%
4 1 1 03	Pajak Hiburan	1.802.000.000,00	2.332.473.974,00	530.473.974,00	129,44%
4 1 1 03 01	Tontonan Film / Bioskop	805.000.000,00	1.123.223.227,00	318.223.227,00	139,53%
4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian / Musik / Tari / Busana	22.000.000,00	25.800.000,00	3.800.000,00	117,27%
4 1 1 03 03	Diskotik	425.000.000,00	490.235.772,00	65.235.772,00	115,35%
4 1 1 03 06	Permainan Ketangkasan / Bilyard	450.000.000,00	562.680.500,00	112.680.500,00	125,04%
4 1 1 03 07	Pusat Kebugaran	30.000.000,00	45.636.275,00	15.636.275,00	152,12%
4 1 1 03 08	Pertandingan Olahraga	70.000.000,00	84.898.200,00	14.898.200,00	121,28%
4 1 1 04	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	1.837.373.634,87	337.373.634,87	122,49%
4 1 1 04 01	Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron	1.470.000.000,00	1.803.023.634,87	333.023.634,87	122,65%
4 1 1 04 04	Reklame Berjalan	30.000.000,00	34.350.000,00	4.350.000,00	114,50%
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	20.125.000.000,00	20.627.903.089,64	502.903.089,64	102,50%

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	20.000.000.000,00	20.496.140.553,00	496.140.553,00	102,48%
4 1 1 05 02	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	125.000.000,00	131.762.536,64	6.762.536,64	105,41%
4 1 1 06	Pajak Parkir	1.750.000.000,00	1.911.580.014,00	161.580.014,00	109,23%
4 1 1 06 01	Pajak Parkir	1.750.000.000,00	1.911.580.014,00	161.580.014,00	109,23%
4 1 1 07	Pajak Air Tanah	300.000.000,00	330.002.129,20	30.002.129,20	110,00%
4 1 1 07 01	Pajak Air Tanah	300.000.000,00	330.002.129,20	30.002.129,20	110,00%
4 1 1 08	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	20.100.000.000,00	23.753.115.140,56	3.653.115.140,56	118,17%
4 1 1 08 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	20.100.000.000,00	23.753.115.140,56	3.653.115.140,56	118,17%
4 1 1 09	Pajak Bumi dan Bangunan	19.500.000.000,00	20.671.858.858,00	1.171.858.858,00	106,01%
4 1 1 09 01	Pajak Bumi dan Bangunan	19.500.000.000,00	20.671.858.858,00	1.171.858.858,00	106,01%
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	18.471.738.200,00	20.301.325.919,00	1.829.587.719,00	109,90%
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	7.787.250.000,00	7.701.829.190,00	(85.420.810,00)	98,90%
4 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	210.000.000,00	227.944.000,00	17.944.000,00	108,54%
4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.201.000.000,00	2.761.329.000,00	(439.671.000,00)	86,26%
4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar	3.810.190.000,00	4.170.236.890,00	360.046.890,00	109,45%
4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	505.000.000,00	474.996.800,00	(30.003.200,00)	94,06%
4 1 2 01 09	Retribusi Ulang Tera	61.060.000,00	67.322.500,00	6.262.500,00	0,00%
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	9.182.508.200,00	10.663.257.504,00	1.480.749.304,00	116,13%
4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.445.420.200,00	8.442.093.638,00	996.673.438,00	113,39%
4 1 2 02 04	Retribusi Tempat Khusus Parkir	823.920.000,00	992.301.956,00	168.381.956,00	120,44%
4 1 2 02 05	Retribusi Rumah Potong Hewan	52.700.000,00	40.418.000,00	(12.282.000,00)	76,69%
4 1 2 02 06	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	860.468.000,00	1.188.443.910,00	327.975.910,00	138,12%
4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.501.980.000,00	1.936.239.225,00	434.259.225,00	128,91%
4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.500.000.000,00	1.934.259.225,00	434.259.225,00	128,95%
4 1 2 03 04	Retribusi Izin Trayek	1.980.000,00	1.980.000,00	-	100,00%
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	14.641.711.306,00	14.641.711.340,55	34,55	100,00%
4 1 3 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	8.527.026.022,50	8.527.026.057,05	34,55	100,00%
4 1 3 01 01	PDAM Kota Madiun	5.711.547.090,00	5.711.547.090,00	-	100,00%
4 1 3 01 02	BPR Bank Daerah Kota Madiun	2.121.736.367,05	2.121.736.367,05	-	100,00%

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4 1 3 01 03	PD Aneka Usaha Kota Madiun	693.742.565,45	693.742.600,00	34,55	0,00%
4 1 3 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Propinsi	6.114.685.283,50	6.114.685.283,50	-	100,00%
4 1 3 02 01	BPD Bank Jatim	6.114.685.283,50	6.114.685.283,50	-	100,00%
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	111.002.632.000,00	126.028.525.498,59	11.952.474.132,88	113,54%
4 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	17.500.000,00	25.017.000,00	7.517.000,00	142,95%
4 1 4 01 09	Penjualan Hasil Perikanan	17.500.000,00	25.017.000,00	7.517.000,00	142,95%
4 1 4 02	Jasa Giro	1.500.000.000,00	1.516.424.370,65	16.424.370,65	101,09%
4 1 4 02 01	Jasa Giro Kas Daerah	1.500.000.000,00	1.516.423.603,09	16.423.603,09	101,09%
4 1 4 02 02	Jasa Giro Pemegang Kas	-	767,56	767,56	0,00%
4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito	9.000.000.000,00	18.141.780.820,88	9.141.780.820,88	201,58%
4 1 4 03 01	Rekening Deposito pada Bank	9.000.000.000,00	18.141.780.820,88	9.141.780.820,88	201,58%
4 1 4 06	Pendapatan Atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	847.441.442,46	847.441.442,46	0,00%
4 1 4 06 01	Pendapatan Atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	847.441.442,46	847.441.442,46	0,00%
4 1 4 07	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	3.682,00	3.682,00	0,00%
4 1 4 07 02	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	3.682,00	3.682,00	0,00%
4 1 4 10	Pendapatan Dari Pengembalian	-	104.875.185,41	18.900.746,00	0,00%
4 1 4 10 03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	18.900.746,00	18.900.746,00	0,00%
4 1 4 10 04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Realisasi Belanja	-	85.974.439,41	85.974.439,41	0,00%
4 1 4 12	Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan	192.000.000,00	83.502.300,00	(108.497.700,00)	43,49%
4 1 4 12 01	Angsuran / Cicilan Penjualan Bangunan	192.000.000,00	83.502.300,00	(108.497.700,00)	43,49%
4 1 4 13	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	100.000.000,00	125.232.086,26	25.232.086,26	125,23%
4 1 4 13 01	Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK)	100.000.000,00	125.232.086,26	25.232.086,26	125,23%
4 1 4 14	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah	-	2.121.099.055,84	2.121.099.055,84	0,00%
4 1 4 14 01	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah	-	2.121.099.055,84	2.121.099.055,84	0,00%
4 1 4 15	Pendapatan BLUD	100.193.132.000,00	103.063.149.555,09	2.870.017.555,09	102,86%

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4 1 4 15 01	Pendapatan BLUD RSUD	90.000.000.000,00	92.096.175.060,81	2.096.175.060,81	102,33%
4 1 4 15 02	Pendapatan BLUD Puskesmas	10.193.132.000,00	10.966.974.494,28	773.842.494,28	107,59%
4 2	Dana Perimbangan	733.188.381.000,00	681.537.181.650,00	(51.651.199.350,00)	92,96%
4 2 1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	125.628.352.000,00	82.701.952.831,00	(42.926.399.169,00)	65,83%
4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	25.371.694.000,00	16.076.390.385,00	(9.295.303.615,00)	63,36%
4 2 1 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	4.475.453.000,00	3.507.795.600,00	(967.657.400,00)	78,38%
4 2 1 01 02	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang	20.896.241.000,00	12.568.594.785,00	(8.327.646.215,00)	60,15%
4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	86.329.381.000,00	52.685.578.633,00	(33.643.802.367,00)	61,03%
4 2 1 02 01	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	234.970.000,00	140.982.000,00	(93.988.000,00)	60,00%
4 2 1 02 02	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	590.155.800,00	(393.437.200,00)	60,00%
4 2 1 02 04	Bagi Hasil Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	84.265.715.000,00	51.351.710.360,00	(32.914.004.640,00)	60,94%
4 2 1 02 05	Bagi Hasil Minerba	811.364.000,00	34.775.673,00	(776.588.327,00)	4,29%
4 2 1 02 06	Bagi Hasil Sumber daya Alam Panas Bumi	33.739.000,00	567.954.800,00	534.215.800,00	168337,77%
4 2 1 03	Dana Bagi Hasil Cukai	13.927.277.000,00	13.939.983.813,00	12.706.813,00	100,09%
4 2 1 03 01	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	13.927.277.000,00	13.939.983.813,00	12.706.813,00	100,09%
4 2 2	Dana Alokasi Umum	522.596.024.000,00	522.596.024.000,00	-	100,00%
4 2 2 01	Dana Alokasi Umum	522.596.024.000,00	522.596.024.000,00	-	100,00%
4 2 2 01 01	Dana Alokasi Umum	522.596.024.000,00	522.596.024.000,00	-	100,00%
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	84.964.005.000,00	76.239.204.819,00	(8.724.800.181,00)	89,73%
4 2 3 01	Dana Alokasi Khusus Reguler	12.604.811.000,00	13.420.729.349,00	815.918.349,00	106,47%
4 2 3 01 02	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	957.238.000,00	4.467.310.349,00	3.510.072.349,00	466,69%
4 2 3 01 03	Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan	9.896.100.000,00	8.953.419.000,00	(942.681.000,00)	90,47%
4 2 3 01 09	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana	298.924.000,00	-	(298.924.000,00)	0,00%
4 2 3 01 21	Dana Alokasi Khusus Bidang Rujukan	1.452.549.000,00	-	(1.452.549.000,00)	0,00%
4 2 3 02	Dana Alokasi Khusus Non Reguler	1.917.882.000,00	-	(1.917.882.000,00)	0,00%
4 2 3 02 03	DAK Penurunan Stunting	156.052.000,00	-	(156.052.000,00)	0,00%
4 2 3 02 04	DAK Pengendalian Penyakit	1.761.830.000,00	-	(1.761.830.000,00)	0,00%
4 2 3 03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	70.441.312.000,00	62.818.475.470,00	(7.622.836.530,00)	89,18%
4 2 3 03 02	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.456.800.000,00	3.948.600.000,00	(508.200.000,00)	88,60%
4 2 3 03 03	Tunjangan Profesi Guru	59.959.146.000,00	54.369.533.120,00	(5.589.612.880,00)	90,68%

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4 2 3 03 04	Tambahan Penghasilan Guru	200.350.000,00	142.850.000,00	(57.500.000,00)	71,30%
4 2 3 03 05	Bantuan Operasional Kesehatan	3.332.562.000,00	2.678.626.700,00	(653.935.300,00)	80,38%
4 2 3 03 08	Jaminan Persalinan	374.000.000,00	-	(374.000.000,00)	0,00%
4 2 3 03 09	Bantuan Operasional KB	725.243.000,00	336.437.450,00	(388.805.550,00)	46,39%
4 2 3 03 12	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	837.511.000,00	786.728.200,00	(50.782.800,00)	93,94%
4 2 3 03 13	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	555.700.000,00	555.700.000,00	-	100,00%
4 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	140.380.580.000,00	160.781.561.933,00	20.400.981.933,00	114,53%
4 3 1	Pendapatan Hibah	19.356.661.000,00	19.189.280.000,00	(167.381.000,00)	99,14%
4 3 1 06	Hibah Dana BOS	19.356.661.000,00	19.189.280.000,00	(167.381.000,00)	99,14%
4 3 1 06 01	Dana BOS pada SDN 01 Kartoharjo	292.000.000,00	285.280.000,00	(6.720.000,00)	97,70%
4 3 1 06 02	Dana BOS pada SDN 02 Kartoharjo	68.000.000,00	49.920.000,00	(18.080.000,00)	73,41%
4 3 1 06 03	Dana BOS pada SDN 03 Kartoharjo	68.800.000,00	61.920.000,00	(6.880.000,00)	90,00%
4 3 1 06 04	Dana BOS pada SDN 01 Klegan	312.000.000,00	292.800.000,00	(19.200.000,00)	93,85%
4 3 1 06 05	Dana BOS pada SDN 02 Klegan	128.000.000,00	116.480.000,00	(11.520.000,00)	91,00%
4 3 1 06 06	Dana BOS pada SDN 03 Klegan	295.200.000,00	282.720.000,00	(12.480.000,00)	95,77%
4 3 1 06 07	Dana BOS pada SDN 04 Klegan	96.000.000,00	83.040.000,00	(12.960.000,00)	86,50%
4 3 1 06 08	Dana BOS pada SDN Oro Oro Ombo	249.744.000,00	220.640.000,00	(29.104.000,00)	88,35%
4 3 1 06 09	Dana BOS pada SDN 01 Rejomulyo	85.600.000,00	81.280.000,00	(4.320.000,00)	94,95%
4 3 1 06 10	Dana BOS pada SDN 02 Rejomulyo	52.800.000,00	50.880.000,00	(1.920.000,00)	96,36%
4 3 1 06 11	Dana BOS pada SDN 01 Kanigoro	118.946.000,00	85.440.000,00	(33.506.000,00)	71,83%
4 3 1 06 12	Dana BOS pada SDN 02 Kanigoro	142.845.000,00	134.080.000,00	(8.765.000,00)	93,86%
4 3 1 06 13	Dana BOS pada SDN 03 Kanigoro	146.400.000,00	139.360.000,00	(7.040.000,00)	95,19%
4 3 1 06 14	Dana BOS pada SDN Sukosari	48.000.000,00	31.360.000,00	(16.640.000,00)	65,33%
4 3 1 06 15	Dana BOS pada SDN Pilangbango	194.400.000,00	173.760.000,00	(20.640.000,00)	89,38%
4 3 1 06 16	Dana BOS pada SDN 01 Tawangrejo	134.400.000,00	132.640.000,00	(1.760.000,00)	98,69%
4 3 1 06 17	Dana BOS pada SDN 02 Tawangrejo	88.800.000,00	80.320.000,00	(8.480.000,00)	90,45%
4 3 1 06 18	Dana BOS pada SDN Kelun	152.000.000,00	140.640.000,00	(11.360.000,00)	92,53%
4 3 1 06 19	Dana BOS pada SDN 01 Manguharjo	299.200.000,00	264.960.000,00	(34.240.000,00)	88,56%
4 3 1 06 20	Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Lor	251.694.000,00	244.480.000,00	(7.214.000,00)	97,13%
4 3 1 06 21	Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Lor	112.800.000,00	110.240.000,00	(2.560.000,00)	97,73%

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4 3 1 06 22	Dana BOS pada SDN 01 Madiun Lor	109.600.000,00	104.960.000,00	(4.640.000,00)	95,77%
4 3 1 06 23	Dana BOS pada SDN 02 Madiun Lor	131.200.000,00	119.520.000,00	(11.680.000,00)	91,10%
4 3 1 06 24	Dana BOS pada SDN 03 Madiun Lor	415.200.000,00	417.280.000,00	2.080.000,00	100,50%
4 3 1 06 25	Dana BOS pada SDN 04 Madiun Lor	296.800.000,00	286.560.000,00	(10.240.000,00)	96,55%
4 3 1 06 26	Dana BOS pada SDN 05 Madiun Lor	356.000.000,00	359.200.000,00	3.200.000,00	100,90%
4 3 1 06 27	Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Kidul	136.000.000,00	120.000.000,00	(16.000.000,00)	88,24%
4 3 1 06 28	Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Kidul	95.200.000,00	160.360.000,00	65.160.000,00	168,45%
4 3 1 06 29	Dana BOS pada SDN 03 Nambangan Kidul	260.000.000,00	248.800.000,00	(11.200.000,00)	95,69%
4 3 1 06 30	Dana BOS pada SDN 04 Nambangan Kidul	128.800.000,00	117.600.000,00	(11.200.000,00)	91,30%
4 3 1 06 31	Dana BOS pada SDN 01 Winongo	278.400.000,00	270.240.000,00	(8.160.000,00)	97,07%
4 3 1 06 32	Dana BOS pada SDN 02 Winongo	76.800.000,00	52.480.000,00	(24.320.000,00)	68,33%
4 3 1 06 33	Dana BOS pada SDN Ngegong	112.000.000,00	199.400.000,00	87.400.000,00	178,04%
4 3 1 06 34	Dana BOS pada SDN Patihan	305.182.000,00	282.400.000,00	(22.782.000,00)	92,53%
4 3 1 06 35	Dana BOS pada SDN 01 Pangongangan	92.000.000,00	72.480.000,00	(19.520.000,00)	78,78%
4 3 1 06 36	Dana BOS pada SDN 02 Pangongangan	264.000.000,00	253.280.000,00	(10.720.000,00)	95,94%
4 3 1 06 37	Dana BOS pada SDN Sogaten	149.600.000,00	143.040.000,00	(6.560.000,00)	95,61%
4 3 1 06 38	Dana BOS pada SDN 01 Taman	391.315.000,00	361.920.000,00	(29.395.000,00)	92,49%
4 3 1 06 39	Dana BOS pada SDN 02 Taman	54.400.000,00	62.080.000,00	7.680.000,00	114,12%
4 3 1 06 40	Dana BOS pada SDN 03 Taman	91.200.000,00	81.440.000,00	(9.760.000,00)	89,30%
4 3 1 06 41	Dana BOS pada SDN 01 Pandean	294.400.000,00	283.520.000,00	(10.880.000,00)	96,30%
4 3 1 06 42	Dana BOS pada SDN 02 Pandean	249.577.000,00	258.880.000,00	9.303.000,00	103,73%
4 3 1 06 43	Dana BOS pada SDN Banjarejo	387.648.000,00	367.360.000,00	(20.288.000,00)	94,77%
4 3 1 06 44	Dana BOS pada SDN 01 Mojorejo	116.800.000,00	102.880.000,00	(13.920.000,00)	88,08%
4 3 1 06 45	Dana BOS pada SDN 02 Mojorejo	440.800.000,00	430.240.000,00	(10.560.000,00)	97,60%
4 3 1 06 46	Dana BOS pada SDN 01 Manisrejo	295.200.000,00	281.600.000,00	(13.600.000,00)	95,39%
4 3 1 06 47	Dana BOS pada SDN 02 Manisrejo	260.800.000,00	247.360.000,00	(13.440.000,00)	94,85%
4 3 1 06 48	Dana BOS pada SDN 03 Manisrejo	146.400.000,00	143.360.000,00	(3.040.000,00)	97,92%
4 3 1 06 49	Dana BOS pada SDN 04 Manisrejo	217.907.000,00	183.840.000,00	(34.067.000,00)	84,37%
4 3 1 06 50	Dana BOS pada SDN 01 Demangan	127.200.000,00	124.640.000,00	(2.560.000,00)	97,99%
4 3 1 06 51	Dana BOS pada SDN 02 Demangan	146.400.000,00	136.800.000,00	(9.600.000,00)	93,44%
4 3 1 06 52	Dana BOS pada SDN 01 Josenan	152.800.000,00	148.960.000,00	(3.840.000,00)	97,49%

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4 3 1 06 53	Dana BOS pada SDN 02 Josenan	149.600.000,00	144.640.000,00	(4.960.000,00)	96,68%
4 3 1 06 54	Dana BOS pada SDN 03 Josenan	91.200.000,00	83.840.000,00	(7.360.000,00)	91,93%
4 3 1 06 55	Dana BOS pada SDN Kejuron	62.400.000,00	48.800.000,00	(13.600.000,00)	78,21%
4 3 1 06 56	Dana BOS pada SDN Kuncen	69.600.000,00	66.880.000,00	(2.720.000,00)	96,09%
4 3 1 06 57	Dana BOS pada SMP Negeri 1	774.000.000,00	1.303.000.000,00	529.000.000,00	168,35%
4 3 1 06 58	Dana BOS pada SMP Negeri 2	703.000.000,00	752.000.000,00	49.000.000,00	106,97%
4 3 1 06 59	Dana BOS pada SMP Negeri 3	572.000.000,00	570.600.000,00	(1.400.000,00)	99,76%
4 3 1 06 60	Dana BOS pada SMP Negeri 4	928.642.000,00	890.400.000,00	(38.242.000,00)	95,88%
4 3 1 06 61	Dana BOS pada SMP Negeri 5	457.000.000,00	462.800.000,00	5.800.000,00	101,27%
4 3 1 06 62	Dana BOS pada SMP Negeri 6	689.025.000,00	648.400.000,00	(40.625.000,00)	94,10%
4 3 1 06 63	Dana BOS pada SMP Negeri 7	776.910.000,00	755.600.000,00	(21.310.000,00)	97,26%
4 3 1 06 64	Dana BOS pada SMP Negeri 8	549.000.000,00	549.200.000,00	200.000,00	100,04%
4 3 1 06 65	Dana BOS pada SMP Negeri 9	491.000.000,00	437.800.000,00	(53.200.000,00)	89,16%
4 3 1 06 66	Dana BOS pada SMP Negeri 10	577.026.000,00	521.200.000,00	(55.826.000,00)	90,33%
4 3 1 06 67	Dana BOS pada SMP Negeri 11	655.000.000,00	653.400.000,00	(1.600.000,00)	99,76%
4 3 1 06 68	Dana BOS pada SMP Negeri 12	745.000.000,00	717.400.000,00	(27.600.000,00)	96,30%
4 3 1 06 69	Dana BOS pada SMP Negeri 13	705.000.000,00	724.600.000,00	19.600.000,00	102,78%
4 3 1 06 70	Dana BOS pada SMP Negeri 14	444.000.000,00	374.000.000,00	(70.000.000,00)	84,23%
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	64.366.614.000,00	84.934.976.933,00	20.568.362.933,00	131,96%
4 3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	64.366.614.000,00	84.934.976.933,00	20.568.362.933,00	131,96%
4 3 3 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	16.600.776.000,00	27.502.812.146,00	10.902.036.146,00	165,67%
4 3 3 01 02	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.188.188.000,00	12.671.773.186,00	4.483.585.186,00	154,76%
4 3 3 01 03	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.745.593.000,00	22.404.927.429,00	6.659.334.429,00	142,29%
4 3 3 01 04	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	163.486.000,00	250.651.372,00	87.165.372,00	153,32%
4 3 3 01 05	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	23.668.571.000,00	22.104.812.800,00	(1.563.758.200,00)	93,39%
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	55.542.726.000,00	55.542.726.000,00	-	100,00%
4 3 4 01	Dana Penyesuaian	55.542.726.000,00	55.542.726.000,00	-	100,00%
4 3 4 01 01	Dana Insentif Daerah	55.542.726.000,00	55.542.726.000,00	-	100,00%

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.114.579.000,00	1.114.579.000,00	-	100,00%
4 3 5 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	1.114.579.000,00	1.114.579.000,00	-	100,00%
4 3 5 01 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Timur	1.114.579.000,00	1.114.579.000,00	-	100,00%
	Jumlah Pendapatan	1.100.017.042.506,00	1.094.367.497.996,59	(5.649.544.509,41)	99,49%
5	BELANJA	1.377.795.868.937,22	1.148.496.711.114,00	(227.932.667.823,22)	83,36%
5 1	Belanja Tidak Langsung	544.763.013.542,14	406.498.199.329,08	(136.898.324.213,06)	74,62%
5 1 1	Belanja Pegawai	446.900.407.136,00	375.303.304.387,00	(71.597.102.749,00)	83,98%
5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	261.632.735.770,00	225.712.878.659,00	(35.919.857.111,00)	86,27%
5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	198.697.300.946,00	172.494.368.469,00	(26.202.932.477,00)	86,81%
5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	17.214.364.832,00	15.119.565.092,00	(2.094.799.740,00)	87,83%
5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	7.721.856.020,00	5.598.814.750,00	(2.123.041.270,00)	72,51%
5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	10.421.358.000,00	9.240.982.000,00	(1.180.376.000,00)	88,67%
5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	3.777.826.338,00	2.968.255.000,00	(809.571.338,00)	78,57%
5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	9.654.141.580,00	7.621.046.220,00	(2.033.095.360,00)	78,94%
5 1 1 01 07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	449.555.198,00	378.472.232,00	(71.082.966,00)	84,19%
5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	3.578.856,00	2.575.939,00	(1.002.917,00)	71,98%
5 1 1 01 09	Iuran Asuransi Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian	7.216.007.000,00	6.238.244.357,00	(977.762.643,00)	86,45%
5 1 1 01 10	Uang Paket	73.000.000,00	57.435.000,00	(15.565.000,00)	78,68%
5 1 1 01 11	Tunjangan Badan Musyawarah	21.011.000,00	19.259.625,00	(1.751.375,00)	91,66%
5 1 1 01 12	Tunjangan Komisi	36.358.000,00	34.667.325,00	(1.690.675,00)	95,35%
5 1 1 01 13	Tunjangan Badan Anggaran	21.011.000,00	19.259.625,00	(1.751.375,00)	91,66%
5 1 1 01 14	Tunjangan Badan Kehormatan	5.664.000,00	4.963.350,00	(700.650,00)	87,63%
5 1 1 01 16	Tunjangan Perumahan	2.682.000.000,00	2.715.000.000,00	33.000.000,00	101,23%
5 1 1 01 18	Uang Jasa Pengabdian	378.000.000,00	261.135.000,00	(116.865.000,00)	69,08%
5 1 1 01 19	Tunjangan Reses	945.000.000,00	609.000.000,00	(336.000.000,00)	64,44%
5 1 1 01 20	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	13.703.000,00	28.000.000,00	14.297.000,00	204,33%
5 1 1 01 21	Tunjangan Badan Legeslatif	33.000.000,00	12.834.675,00	(20.165.325,00)	38,89%
5 1 1 01 23	Tunjangan Transportasi	2.268.000.000,00	2.289.000.000,00	21.000.000,00	100,93%

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	95.611.941.000,00	81.128.509.671,00	(14.483.431.329,00)	84,85%
5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	76.847.441.000,00	66.192.558.196,00	(10.654.882.804,00)	86,14%
5 1 1 02 09	Tambahan Penghasilan Guru	10.775.000.000,00	7.978.111.475,00	(2.796.888.525,00)	74,04%
5 1 1 02 10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif	7.989.500.000,00	6.957.840.000,00	(1.031.660.000,00)	87,09%
5 1 1 03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH / WKDH	4.786.800.000,00	4.454.496.650,00	(332.303.350,00)	93,06%
5 1 1 03 01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00	3.780.000.000,00	-	100,00%
5 1 1 03 02	Belanja Penunjang Operasional KDH / WKDH	600.000.000,00	461.560.000,00	(138.440.000,00)	76,93%
5 1 1 03 03	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	226.800.000,00	184.800.000,00	(42.000.000,00)	81,48%
5 1 1 03 04	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	180.000.000,00	28.136.650,00	(151.863.350,00)	15,63%
5 1 1 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4.100.000.000,00	3.992.809.987,00	(107.190.013,00)	97,39%
5 1 1 05 01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4.100.000.000,00	3.992.809.987,00	(107.190.013,00)	97,39%
5 1 1 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	82.476.000,00	-	(82.476.000,00)	0,00%
5 1 1 06 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	82.476.000,00	-	(82.476.000,00)	0,00%
5 1 1 07	Tunjangan Profesi Guru	80.686.454.366,00	60.014.609.420,00	(20.671.844.946,00)	74,38%
5 1 1 07 01	Tunjangan Profesi Guru	79.617.203.670,00	59.801.859.420,00	(19.815.344.250,00)	75,11%
5 1 1 07 02	Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD	1.069.250.696,00	212.750.000,00	(856.500.696,00)	19,90%
5 1 4	Belanja Hibah	16.489.695.000,00	15.422.819.810,08	(1.066.875.189,92)	93,53%
5 1 4 05	Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi Masyarakat	16.489.695.000,00	15.422.819.810,08	(1.066.875.189,92)	93,53%
5 1 4 05 01	Hibah kepada KORPRI	168.250.000,00	168.250.000,00	-	100,00%
5 1 4 05 03	Hibah kepada KONI	5.921.765.500,00	5.606.792.820,08	(314.972.679,92)	94,68%
5 1 4 05 04	Hibah kepada Pramuka	308.050.000,00	305.462.750,00	(2.587.250,00)	99,16%
5 1 4 05 05	Hibah kepada PMI	1.050.130.000,00	968.116.250,00	(82.013.750,00)	92,19%
5 1 4 05 06	Hibah kepada MUI	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00%
5 1 4 05 07	Hibah kepada BAZ	388.615.000,00	388.615.000,00	-	100,00%
5 1 4 05 11	Hibah kepada Dewan Pendidikan	175.000.000,00	-	(175.000.000,00)	0,00%
5 1 4 05 19	Hibah Kepada GOW	808.550.000,00	808.550.000,00	-	100,00%
5 1 4 05 20	Hibah Kepada Dharma Wanita	179.955.000,00	179.955.000,00	-	100,00%

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5 1 4 05 28	Hibah Operasional PAUD (DAK)	4.456.800.000,00	4.019.720.990,00	(437.079.010,00)	90,19%
5 1 4 05 29	Hibah Kepada Kelompok Pelayanan Lanjut Usia	30.122.500,00	-	(30.122.500,00)	0,00%
5 1 4 05 34	Hibah kepada ORKEMAS/LSM	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00%
5 1 4 05 43	Hibah Kepada Badan Wakaf Indonesia	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	0,00%
5 1 4 05 44	Hibah Kepada PGRI	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00%
5 1 4 05 48	Hibah Kepada Persatuan Purnawirawan POLRI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00%
5 1 4 05 50	Hibah Kepada LKP2 TPA/TPQ	1.586.400.000,00	1.586.400.000,00	-	100,00%
5 1 4 05 54	Hibah Kepada Lembaga Masyarakat Peduli Lingkungan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00%
5 1 4 05 55	Hibah Kepada Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00%
5 1 4 05 56	Hibah Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama	200.357.000,00	200.357.000,00	-	100,00%
5 1 4 05 57	Hibah Kepada Dewan Koperasi Indonesia	130.000.000,00	130.000.000,00	-	100,00%
5 1 4 05 59	Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK)	555.700.000,00	555.600.000,00	(100.000,00)	99,98%
5 1 5	Belanja Bantuan Sosial	17.630.500.000,00	15.001.277.870,00	(1.262.732.130,00)	85,09%
5 1 5 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	9.565.600.000,00	7.841.779.870,00	(357.330.130,00)	81,98%
5 1 5 02 01	Bantuan Sosial kepada Pengelola Tempat Ibadah	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00%
5 1 5 02 04	Bantuan Sosial kepada Kelompok Pelayanan Lanjut Usia	266.000.000,00	226.122.500,00	(39.877.500,00)	85,01%
5 1 5 02 07	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Diniyah (BOSDA Madin)	953.700.000,00	953.700.000,00	-	100,00%
5 1 5 02 15	Bantuan Sosial Kepada Panti Asuhan	148.700.000,00	148.700.000,00	-	100,00%
5 1 5 02 16	Bantuan Beasiswa Mahasiswa	3.600.000.000,00	3.330.000.000,00	(270.000.000,00)	92,50%
5 1 5 02 18	Bansos RTLH	1.330.000.000,00	1.282.547.370,00	(47.452.630,00)	96,43%
5 1 5 02 19	Bantuan Beasiswa Mahasiswa Politeknik Madiun	924.000.000,00	161.500.000,00	(762.500.000,00)	17,48%
5 1 5 02 20	Bantuan Beasiswa Mahasiswa Akademi Perkeretaaapian Indonesia (API)	1.824.000.000,00	1.220.010.000,00	(603.990.000,00)	66,89%
5 1 5 02 21	Bantuan Sosial Guru Non PNS	56.000.000,00	56.000.000,00	-	100,00%

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5 1 5 02 22	Bantuan Sosial Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS	163.200.000,00	163.200.000,00	-	100,00%
5 1 5 03	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	7.380.900.000,00	7.092.630.000,00	(288.270.000,00)	96,09%
5 1 5 03 01	Bantuan Sosial kepada Perintis Kemerdekaan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
5 1 5 03 05	Bantuan Sosial Pengabdian Tokoh Masyarakat	1.344.600.000,00	1.267.800.000,00	(76.800.000,00)	94,29%
5 1 5 03 06	Jambanisasi	295.000.000,00	289.310.000,00	(5.690.000,00)	98,07%
5 1 5 03 13	Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Daerah	2.708.300.000,00	2.611.270.000,00	(97.030.000,00)	96,42%
5 1 5 03 14	Bantuan Sosial Guru dan Tenaga Kependidikan Swasta (PAUD, SD, SMP)	3.024.000.000,00	2.915.250.000,00	(108.750.000,00)	96,40%
5 1 5 04	Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan	684.000.000,00	66.868.000,00	(617.132.000,00)	9,78%
5 1 5 04 01	Bantuan Sosial Akibat Bencana	250.000.000,00	60.568.000,00	(189.432.000,00)	24,23%
5 1 5 04 08	Bantuan Orang Terlantar	60.000.000,00	6.300.000,00	(53.700.000,00)	10,50%
5 1 5 04 09	Bantuan Jaminan Persalinan	374.000.000,00	-	(374.000.000,00)	0,00%
5 1 7	Belanja Bantuan Keuangan	651.920.000,00	651.920.000,00	-	100,00%
5 1 7 05	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	651.920.000,00	651.920.000,00	-	100,00%
5 1 7 05 01	Belanja Bantuan kepada Partai Demokrat	133.271.000,00	133.271.000,00	-	100,00%
5 1 7 05 02	Belanja Bantuan kepada PDIP	133.697.000,00	133.697.000,00	-	100,00%
5 1 7 05 03	Belanja Bantuan kepada Partai Gerindra	81.228.000,00	81.228.000,00	-	100,00%
5 1 7 05 04	Belanja Bantuan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	66.496.000,00	66.496.000,00	-	100,00%
5 1 7 05 05	Belanja Bantuan kepada Partai Nasdem	43.858.000,00	43.858.000,00	-	100,00%
5 1 7 05 06	Belanja Bantuan kepada Partai Golkar	42.568.000,00	42.568.000,00	-	100,00%
5 1 7 05 07	Belanja Bantuan kepada Partai Amanat Nasional	26.102.000,00	26.102.000,00	-	100,00%
5 1 7 05 08	Belanja Bantuan kepada Partai Keadilan Sejahtera	32.943.000,00	32.943.000,00	-	100,00%
5 1 7 05 09	Belanja Bantuan kepada Partai Hanura	27.936.000,00	27.936.000,00	-	100,00%
5 1 7 05 10	Belanja Bantuan kepada Partai Persatuan Pembangunan	19.713.000,00	19.713.000,00	-	100,00%

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5 1 7 05 11	Belanja Bantuan kepada Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	26.709.000,00	26.709.000,00	-	100,00%
5 1 7 05 12	Belanja Bantuan kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	17.399.000,00	17.399.000,00	-	100,00%
5 1 8	Belanja Tidak Terduga	63.090.491.406,14	118.877.262,00	(62.971.614.144,14)	18,84%
5 1 8 01	Belanja Tidak Terduga	63.090.491.406,14	118.877.262,00	(62.971.614.144,14)	18,84%
5 1 8 01 01	Belanja Tidak Terduga	63.090.491.406,14	118.877.262,00	(62.971.614.144,14)	18,84%
5 2	Belanja Langsung	833.032.855.395,08	741.998.511.784,92	(91.034.343.610,16)	89,07%
5 2 1	Belanja Pegawai	80.661.962.645,00	64.919.057.388,00	(15.742.905.257,00)	80,48%
5 2 1 01	Honorarium PNS	53.819.476.795,00	40.433.695.030,00	(13.385.781.765,00)	75,13%
5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.605.898.440,00	3.767.475.833,00	(838.422.607,00)	81,80%
5 2 1 01 02	Honorarium Pelaksana Pengelola Keuangan dan Barang	267.400.000,00	234.650.000,00	(32.750.000,00)	87,75%
5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	989.090.000,00	644.225.170,00	(344.864.830,00)	65,13%
5 2 1 01 05	Uang Kinerja Kegiatan	47.957.088.355,00	35.787.344.027,00	(12.169.744.328,00)	74,62%
5 2 1 02	Honorarium Non PNS	9.246.610.000,00	8.394.345.000,00	(852.265.000,00)	90,78%
5 2 1 02 01	Honorarium Pegawai Honorar / Tidak Tetap	9.246.610.000,00	8.394.345.000,00	(852.265.000,00)	90,78%
5 2 1 03	Uang Lembur	4.761.359.000,00	4.233.107.325,00	(528.251.675,00)	88,91%
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	1.683.450.000,00	1.600.052.219,00	(83.397.781,00)	95,05%
5 2 1 03 02	Uang Lembur Non PNS	3.077.909.000,00	2.633.055.106,00	(444.853.894,00)	85,55%
5 2 1 05	Belanja Pegawai BLUD	10.057.250.000,00	9.528.675.000,00	(528.575.000,00)	94,74%
5 2 1 05 01	Belanja Pegawai BLUD RSUD	8.088.950.000,00	7.605.890.000,00	(483.060.000,00)	94,03%
5 2 1 05 02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	1.968.300.000,00	1.922.785.000,00	(45.515.000,00)	97,69%
5 2 1 06	Belanja Pegawai BOS	2.777.266.850,00	2.329.235.033,00	(448.031.817,00)	83,87%
5 2 1 06 01	Belanja Pegawai BOS	2.777.266.850,00	2.329.235.033,00	(448.031.817,00)	83,87%
5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	407.719.198.568,00	369.278.712.052,86	(38.440.486.515,14)	90,57%
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.944.707.791,00	19.937.173.455,00	(2.007.534.336,00)	90,85%
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.987.718.229,00	6.811.219.173,00	(176.499.056,00)	97,47%
5 2 2 01 02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender	253.294.560,00	225.997.910,00	(27.296.650,00)	89,22%
5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.697.330.750,00	4.537.597.177,00	(159.733.573,00)	96,60%

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	252.407.550,00	218.796.850,00	(33.610.700,00)	86,68%
5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.457.481.616,00	2.238.261.741,00	(219.219.875,00)	91,08%
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	857.689.800,00	539.806.388,00	(317.883.412,00)	62,94%
5 2 2 01 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	54.173.670,00	46.895.000,00	(7.278.670,00)	86,56%
5 2 2 01 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.230.000,00	998.500,00	(231.500,00)	81,18%
5 2 2 01 09	Belanja Perlengkapan Olahraga	154.661.900,00	151.807.775,00	(2.854.125,00)	98,15%
5 2 2 01 10	Belanja Bahan dan Alat Kesehatan	2.864.432.300,00	2.198.067.005,00	(666.365.295,00)	76,74%
5 2 2 01 11	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	733.734.234,00	700.069.969,00	(33.664.265,00)	95,41%
5 2 2 01 12	Belanja Barang Bukti / Uji / Sampel	88.260.500,00	84.412.800,00	(3.847.700,00)	95,64%
5 2 2 01 13	Belanja Souvenir	803.027.120,00	658.910.160,00	(144.116.960,00)	82,05%
5 2 2 01 14	Belanja Barang Penghargaan	343.288.996,00	331.509.728,00	(11.779.268,00)	96,57%
5 2 2 01 15	Belanja Karangan Bunga	100.449.996,00	63.967.950,00	(36.482.046,00)	63,68%
5 2 2 01 16	Belanja Peralatan Pemakaman	3.246.400,00	1.420.000,00	(1.826.400,00)	43,74%
5 2 2 01 17	Belanja Perlengkapan (bendera/umbul-umbul/rumbai/asesoris lainnya)	1.292.280.170,00	1.127.435.329,00	(164.844.841,00)	87,24%
5 2 2 02	Belanja Bahan / Material	6.760.524.193,00	6.148.942.644,00	(611.581.549,00)	90,95%
5 2 2 02 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	572.610.500,00	519.827.050,00	(52.783.450,00)	90,78%
5 2 2 02 02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	1.924.620.200,00	1.759.597.660,00	(165.022.540,00)	91,43%
5 2 2 02 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.403.900.280,00	1.190.724.866,00	(213.175.414,00)	84,82%
5 2 2 02 05	Belanja Bahan Kimia	285.988.920,00	281.492.230,00	(4.496.690,00)	98,43%
5 2 2 02 06	Belanja Bahan Belajar Mengajar	1.664.803.693,00	1.612.055.527,00	(52.748.166,00)	96,83%
5 2 2 02 07	Belanja Bahan Makanan	908.600.600,00	785.245.311,00	(123.355.289,00)	86,42%
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	111.658.999.572,00	92.731.559.090,22	(18.927.440.481,78)	83,05%
5 2 2 03 01	Belanja Telepon	831.142.800,00	409.675.474,00	(421.467.326,00)	49,29%
5 2 2 03 02	Belanja Air	1.286.254.000,00	803.472.695,00	(482.781.305,00)	62,47%
5 2 2 03 03	Belanja Listrik	17.626.172.000,00	14.112.725.840,00	(3.513.446.160,00)	80,07%
5 2 2 03 04	Belanja Jasa Publikasi	5.038.407.738,00	4.824.938.863,00	(213.468.875,00)	95,76%
5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar / Majalah	228.121.000,00	180.895.500,00	(47.225.500,00)	79,30%

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5 2 2 03 06	Belanja Kawat / Faksimili / Internet	6.153.490.000,00	6.042.980.083,00	(110.509.917,00)	98,20%
5 2 2 03 07	Belanja Paket / Pengiriman	106.414.000,00	42.928.341,00	(63.485.659,00)	40,34%
5 2 2 03 08	Belanja Sertifikasi	192.100.000,00	92.827.400,00	(99.272.600,00)	48,32%
5 2 2 03 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.715.000,00	1.644.500,00	(70.500,00)	95,89%
5 2 2 03 10	Belanja Pembayaran Pajak & Iuran	706.943.700,00	681.522.153,00	(25.421.547,00)	96,40%
5 2 2 03 11	Belanja Jasa Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	2.582.680.700,00	2.325.877.000,00	(256.803.700,00)	90,06%
5 2 2 03 12	Belanja Uji Laboratorium	442.516.000,00	401.069.100,00	(41.446.900,00)	90,63%
5 2 2 03 13	Belanja Jasa Hiburan	1.830.240.544,00	1.759.676.350,00	(70.564.194,00)	96,14%
5 2 2 03 14	Belanja Jasa Tindakan Medis	2.850.000,00	-	(2.850.000,00)	0,00%
5 2 2 03 15	Belanja Jasa Instalasi	393.500.000,00	381.956.850,00	(11.543.150,00)	97,07%
5 2 2 03 16	Belanja Jasa Pembuatan Materi Multimedia	228.579.000,00	226.855.800,00	(1.723.200,00)	99,25%
5 2 2 03 17	Belanja Jasa Biro Perjalanan	404.130.000,00	395.686.500,00	(8.443.500,00)	97,91%
5 2 2 03 18	Belanja Jasa Kebersihan	366.243.000,00	319.969.500,00	(46.273.500,00)	87,37%
5 2 2 03 19	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (EO)	9.008.023.060,00	8.682.794.416,00	(325.228.644,00)	96,39%
5 2 2 03 20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	11.424.908.310,00	8.923.314.580,00	(2.501.593.730,00)	78,10%
5 2 2 03 21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	25.845.770.720,00	22.825.340.228,00	(3.020.430.492,00)	88,31%
5 2 2 03 22	Belanja Jasa Kesenian	822.510.000,00	762.338.500,00	(60.171.500,00)	92,68%
5 2 2 03 23	Belanja Jasa Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	26.029.288.000,00	18.426.069.417,22	(7.603.218.582,78)	70,79%
5 2 2 03 24	Belanja Jasa Administrasi	107.000.000,00	107.000.000,00	-	100,00%
5 2 2 04	Belanja Premi Asuransi	3.411.720.960,00	3.025.083.052,26	(386.637.907,74)	88,67%
5 2 2 04 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	337.500.000,00	271.166.667,82	(66.333.332,18)	80,35%
5 2 2 04 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	2.972.880.960,00	2.657.866.888,44	(315.014.071,56)	89,40%
5 2 2 04 04	Belanja Premi Asuransi Penanganan Bencana	4.140.000,00	3.508.616,00	(631.384,00)	84,75%
5 2 2 04 07	Belanja Premi Asuransi Usaha Tani (AUTD)	97.200.000,00	92.540.880,00	(4.659.120,00)	95,21%
5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.446.276.048,00	6.217.236.004,00	(3.229.040.044,00)	65,82%
5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	1.336.167.750,00	673.939.187,00	(662.228.563,00)	50,44%
5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.134.861.750,00	1.505.208.680,00	(629.653.070,00)	70,51%
5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	5.322.808.300,00	3.648.614.837,00	(1.674.193.463,00)	68,55%

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR	11.288.000,00	3.408.800,00	(7.879.200,00)	30,20%
5 2 2 05 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	641.150.248,00	386.064.500,00	(255.085.748,00)	60,21%
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.574.686.998,00	16.180.867.596,50	(1.393.819.401,50)	92,07%
5 2 2 06 01	Belanja Cetak	14.310.242.923,00	13.341.038.967,50	(969.203.955,50)	93,23%
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	3.115.698.963,00	2.737.245.629,00	(378.453.334,00)	87,85%
5 2 2 06 03	Belanja Dokumentasi	148.745.112,00	102.583.000,00	(46.162.112,00)	68,97%
5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.608.394.308,00	2.873.502.980,00	(734.891.328,00)	79,63%
5 2 2 07 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00%
5 2 2 07 02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	3.227.200.528,00	2.619.008.600,00	(608.191.928,00)	81,15%
5 2 2 07 03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	275.498.000,00	178.453.500,00	(97.044.500,00)	64,77%
5 2 2 07 04	Belanja Sewa Tempat Parkir / Uang Tambat / Hanggar Sarana Mobilitas	2.500.000,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	50,00%
5 2 2 07 05	Belanja Sewa Taman	100.195.780,00	71.790.880,00	(28.404.900,00)	71,65%
5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.890.823.000,00	1.546.659.445,00	(344.163.555,00)	81,80%
5 2 2 08 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.890.823.000,00	1.546.659.445,00	(344.163.555,00)	81,80%
5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.590.367.391,00	5.351.005.462,00	(1.239.361.929,00)	81,19%
5 2 2 10 01	Belanja Sewa Meja dan Kursi	444.961.220,00	386.617.510,00	(58.343.710,00)	86,89%
5 2 2 10 02	Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional	1.159.790.000,00	1.038.612.648,00	(121.177.352,00)	89,55%
5 2 2 10 03	Belanja Sewa Tenda dan Perlengkapannya	3.189.072.100,00	2.739.997.741,00	(449.074.359,00)	85,92%
5 2 2 10 04	Belanja Sewa Peralatan Makan	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	0,00%
5 2 2 10 05	Belanja Sewa Sound System	1.113.901.551,00	899.925.063,00	(213.976.488,00)	80,79%
5 2 2 10 06	Belanja Sewa Komputer dan Perlengkapannya	425.750.000,00	61.572.500,00	(364.177.500,00)	14,46%
5 2 2 10 07	Belanja Sewa Sarana Prasarana Pelatihan	254.892.520,00	224.280.000,00	(30.612.520,00)	87,99%
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.130.262.514,00	30.167.721.294,00	(2.962.541.220,00)	91,06%
5 2 2 11 01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2.816.790.956,00	2.467.338.453,00	(349.452.503,00)	87,59%
5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.961.460.000,00	6.993.224.717,00	(968.235.283,00)	87,84%
5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.074.496.450,00	3.545.928.460,00	(528.567.990,00)	87,03%
5 2 2 11 04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	118.800.000,00	81.980.000,00	(36.820.000,00)	69,01%
5 2 2 11 05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	17.430.787.358,00	16.707.146.914,00	(723.640.444,00)	95,85%

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	727.927.750,00	372.102.750,00	(355.825.000,00)	51,12%
5 2 2 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.153.653.700,00	1.079.377.963,00	(74.275.737,00)	93,56%
5 2 2 12 01	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	70.831.000,00	70.829.755,00	(1.245,00)	100,00%
5 2 2 12 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	165.340.000,00	146.107.000,00	(19.233.000,00)	88,37%
5 2 2 12 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	70.000.000,00	52.800.000,00	(17.200.000,00)	75,43%
5 2 2 12 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	115.025.000,00	98.173.000,00	(16.852.000,00)	85,35%
5 2 2 12 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	99.999.000,00	99.075.000,00	(924.000,00)	99,08%
5 2 2 12 06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	50.400.000,00	37.950.000,00	(12.450.000,00)	75,30%
5 2 2 12 07	Belanja Atribut Pakaian Dinas	582.058.700,00	574.443.208,00	(7.615.492,00)	98,69%
5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	361.717.000,00	326.087.678,00	(35.629.322,00)	90,15%
5 2 2 13 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	361.717.000,00	326.087.678,00	(35.629.322,00)	90,15%
5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	5.366.339.380,00	4.956.881.212,00	(409.458.168,00)	92,37%
5 2 2 14 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
5 2 2 14 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.892.308.400,00	2.680.680.700,00	(211.627.700,00)	92,68%
5 2 2 14 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.550.405.000,00	1.421.722.012,00	(128.682.988,00)	91,70%
5 2 2 14 05	Belanja Pakaian Harian	4.849.560,00	4.754.000,00	(95.560,00)	98,03%
5 2 2 14 07	Belanja Pakaian Seragam Non Dinas	916.776.420,00	847.724.500,00	(69.051.920,00)	92,47%
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.394.737.890,00	40.205.255.910,00	(6.189.481.980,00)	86,66%
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.871.368.460,00	24.202.811.078,00	(3.668.557.382,00)	86,84%
5 2 2 15 03	Bantuan Transport	13.575.868.636,00	12.169.312.500,00	(1.406.556.136,00)	89,64%
5 2 2 15 04	Belanja Akomodasi	4.947.500.794,00	3.833.132.332,00	(1.114.368.462,00)	77,48%
5 2 2 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	108.000.000,00	48.000.000,00	(60.000.000,00)	44,44%
5 2 2 16 05	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	108.000.000,00	48.000.000,00	(60.000.000,00)	44,44%
5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.881.982.080,00	2.655.555.800,00	(226.426.280,00)	92,14%
5 2 2 17 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan	2.592.352.080,00	2.456.412.800,00	(135.939.280,00)	94,76%
5 2 2 17 02	Belanja Sosialisasi	135.000.000,00	45.750.000,00	(89.250.000,00)	33,89%
5 2 2 17 03	Belanja Bimbingan Teknis	154.630.000,00	153.393.000,00	(1.237.000,00)	99,20%
5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan	24.668.603.403,00	22.696.464.521,54	(1.972.138.881,46)	92,01%
5 2 2 20 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.680.593.000,00	1.614.865.000,00	(65.728.000,00)	96,09%
5 2 2 20 02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	101.700.000,00	100.967.000,00	(733.000,00)	99,28%

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5 2 2 20 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.076.372.015,00	13.107.847.669,22	(968.524.345,78)	93,12%
5 2 2 20 04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	3.552.157.874,00	3.201.821.775,00	(350.336.099,00)	90,14%
5 2 2 20 05	Belanja Pemeliharaan saluran/drainase/ gorong-gorong	1.522.159.000,00	1.427.955.750,00	(94.203.250,00)	93,81%
5 2 2 20 06	Belanja Pemeliharaan Mesin	840.248.600,00	737.082.990,00	(103.165.610,00)	87,72%
5 2 2 20 07	Belanja Pemeliharaan Software	83.000.000,00	83.000.000,00	-	100,00%
5 2 2 20 08	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	134.300.000,00	91.322.000,00	(42.978.000,00)	68,00%
5 2 2 20 09	Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah	3.502.000,00	-	(3.502.000,00)	0,00%
5 2 2 20 11	Belanja Pemeliharaan Laundry	43.063.424,00	28.366.800,00	(14.696.624,00)	65,87%
5 2 2 20 12	Belanja Pemeliharaan Alat lalu Lintas	196.150.000,00	194.887.200,00	(1.262.800,00)	99,36%
5 2 2 20 14	Belanja Pemeliharaan Alat Studio / Komunikasi	180.336.450,00	55.193.174,00	(125.143.276,00)	30,61%
5 2 2 20 15	Belanja Pemeliharaan Arsip dan Perpustakaan	202.237.520,00	190.100.000,00	(12.137.520,00)	94,00%
5 2 2 20 16	Belanja Pemeliharaan Alat Persampahan	129.074.000,00	100.721.563,32	(28.352.436,68)	78,03%
5 2 2 20 17	Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan	1.923.709.520,00	1.762.333.600,00	(161.375.920,00)	91,61%
5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.602.045.010,00	5.843.835.523,00	(758.209.487,00)	88,52%
5 2 2 21 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	510.450.000,00	497.904.000,00	(12.546.000,00)	97,54%
5 2 2 21 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.646.092.290,00	3.105.359.330,00	(540.732.960,00)	85,17%
5 2 2 21 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	189.900.000,00	185.606.200,00	(4.293.800,00)	97,74%
5 2 2 21 04	Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Sistem Informasi	936.900.000,00	926.076.993,00	(10.823.007,00)	98,84%
5 2 2 21 06	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	0,00%
5 2 2 21 07	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	938.702.720,00	911.909.000,00	(26.793.720,00)	97,15%
5 2 2 21 08	Belanja Jasa Konsultansi Penilai / Appraisal	330.000.000,00	216.980.000,00	(113.020.000,00)	65,75%
5 2 2 22	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	3.731.493.620,00	3.344.642.204,00	(386.851.416,00)	89,63%
5 2 2 22 01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	3.731.493.620,00	3.344.642.204,00	(386.851.416,00)	89,63%
5 2 2 24	Belanja Software / Aplikasi Komputer	100.000.000,00	98.060.000,00	(1.940.000,00)	98,06%
5 2 2 24 01	Belanja Lincency Software / Aplikasi Komputer	100.000.000,00	98.060.000,00	(1.940.000,00)	98,06%
5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	83.682.278.000,00	87.983.714.667,15	4.301.436.667,15	105,14%

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5 2 2 25 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD	74.838.270.000,00	80.320.022.544,15	5.481.752.544,15	107,32%
5 2 2 25 02	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	8.844.008.000,00	7.663.692.123,00	(1.180.315.877,00)	86,65%
5 2 2 27	Belanja uang diberikan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	3.499.827.990,00	3.197.060.000,00	(302.767.990,00)	91,35%
5 2 2 27 01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	253.000.000,00	167.550.000,00	(85.450.000,00)	66,23%
5 2 2 27 02	Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	3.246.827.990,00	3.029.510.000,00	(217.317.990,00)	93,31%
5 2 2 28	Belanja Barang dan Jasa BOS	13.151.757.720,00	12.664.025.551,19	(487.732.168,81)	96,29%
5 2 2 28 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	13.151.757.720,00	12.664.025.551,19	(487.732.168,81)	96,29%
5 2 3	Belanja Modal	344.651.694.182,08	307.800.742.344,06	(36.850.951.838,02)	89,31%
5 2 3 02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	74.366.924.601,64	68.460.669.520,00	(5.906.255.081,64)	92,06%
5 2 3 02 01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar/Berat	202.500.000,00	202.260.000,00	(240.000,00)	99,88%
5 2 3 02 02	Belanja Modal Alat Angkutan	10.100.162.000,00	9.456.965.880,00	(643.196.120,00)	93,63%
5 2 3 02 03	Belanja Modal Alat Bengkel / Alat Ukur	250.389.000,00	248.501.000,00	(1.888.000,00)	99,25%
5 2 3 02 04	Belanja Modal Alat pertanian	348.036.400,00	336.618.530,00	(11.417.870,00)	96,72%
5 2 3 02 05	Belanja Modal Alat Kantor / Rumah Tangga	36.071.998.401,64	33.824.760.805,00	(2.247.237.596,64)	93,77%
5 2 3 02 06	Belanja Modal Peralatan Studio / Komunikasi	6.242.985.000,00	6.211.179.210,00	(31.805.790,00)	99,49%
5 2 3 02 07	Belanja Modal Peralatan Kedokteran	19.059.351.800,00	16.188.684.795,00	(2.870.667.005,00)	84,94%
5 2 3 02 08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium	29.350.000,00	27.321.300,00	(2.028.700,00)	93,09%
5 2 3 02 10	Belanja Modal Peralatan Peralatan perlengkapan lalu lintas	2.062.152.000,00	1.964.378.000,00	(97.774.000,00)	95,26%
5 2 3 03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	56.572.341.463,00	48.758.211.485,26	(7.814.129.977,74)	86,19%
5 2 3 03 01	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	56.572.341.463,00	48.758.211.485,26	(7.814.129.977,74)	86,19%
5 2 3 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	206.393.491.687,44	184.022.541.935,80	(22.370.949.751,64)	89,16%
5 2 3 04 01	Belanja Modal Jalan	101.323.774.746,44	93.277.992.490,46	(8.045.782.255,98)	92,06%
5 2 3 04 02	Belanja Modal Jembatan	387.350.000,00	349.934.960,00	(37.415.040,00)	90,34%
5 2 3 04 03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	102.069.416.941,00	87.920.138.780,34	(14.149.278.160,66)	86,14%
5 2 3 04 04	Belanja Modal Instalasi dan Jaringan	2.612.950.000,00	2.474.475.705,00	(138.474.295,00)	94,70%
5 2 3 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.253.207.630,00	2.888.082.876,00	(365.124.754,00)	88,78%
5 2 3 05 01	Belanja Modal Pengadaan Buku Dan Kepustakaan	3.173.207.630,00	2.812.986.876,00	(360.220.754,00)	88,65%

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5 2 3 05 02	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Seni / Budaya	80.000.000,00	75.096.000,00	(4.904.000,00)	93,87%
5 2 3 06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.065.728.800,00	3.671.236.527,00	(394.492.273,00)	90,30%
5 2 3 06 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Software	1.264.428.800,00	1.245.371.905,00	(19.056.895,00)	98,49%
5 2 3 06 02	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud DED	1.431.300.000,00	1.096.295.060,00	(335.004.940,00)	76,59%
5 2 3 06 03	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Studi Kelayakan (FS)	150.000.000,00	147.350.000,00	(2.650.000,00)	
5 2 3 06 04	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rencana Induk / Master Plan	500.000.000,00	499.999.562,00	(438,00)	100,00%
5 2 3 06 05	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Hasil Kajian	720.000.000,00	682.220.000,00	(37.780.000,00)	94,75%
5 2 3 06 06	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Hak Paten	-	-	-	
	Jumlah Belanja	1.377.795.868.937,22	1.148.496.711.114,00	(229.299.157.823,22)	83,36%
	Surplus / Defisit	(277.778.826.431,22)	(54.129.213.117,41)	223.649.613.313,81	19,49%
6	PEMBIAYAAN	279.278.826.431,22	279.278.826.431,22	-	100,00%
6 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	279.278.826.431,22	279.278.826.431,22	-	100,00%
6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	279.278.826.431,22	279.278.826.431,22	-	100,00%
6 1 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	279.278.826.431,22	279.278.826.431,22	-	100,00%
6 1 1 01 04	Belanja	279.278.826.431,22	279.278.826.431,22	-	100,00%
6 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	0,00%
6 1 5 01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	0,00%
6 1 5 01 01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	0,00%
6 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	0,00%
6 1 6 06	Penerimaan kembali dana Bergulir	-	-	-	0,00%
6 1 6 06 01	Penerimaan kembali dana Bergulir dan Kelompok Masyarakat	-	-	-	0,00%
6 1	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	100,00%
6 1 1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	100,00%

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
6 1 1 01	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	100,00%
6 1 1 01 04	PD Aneka Usaha Kota Madiun	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	100,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	100,00%
	Pembiayaan Netto	1.500.000.000,00	277.778.826.431,22	276.278.826.431,22	18518,59%
	Selisih Lebih Perhitungan Tahun Yang Lalu		223.649.613.313,81		

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WICOWO, SH

Penyidik Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001